

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Landasan Teoritis

#### 1. Partisipasi Petani

Banyak ahli yang memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu "*participation*" yang berarti pengambilan bagian atau pengikutserataan.

Pengertian partisipasi secara umum adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. (Mardikanto, 2013) Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain. Partisipasi dianggap sebagai proses yang akan menciptakan jaringan sosial baru, yang masing-masing berusaha untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan demi tercapainya tujuan akhir yang diinginkan masyarakat sehingga tahu struktur sosial yang bersangkutan. (Raharjo *dalam* Mardikanto, 2013).

Koampa (2015) mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan. Sedangkan, Mikkelsen *dalam* Koampa (2015) meyakini partisipasi adalah sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

Valhage *dalam* Mardikanto (2013) menyatakan bahwa partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
- c. Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Adanya kepercayaan diri yang dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh (aparatus) pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya (Mardikanto, 2013).

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Menurut Ndraha (1990) mengartikan partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Kegagalan dalam mencapai hasil dari program pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu juga, Partisipasi diartikan sebagai persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Dalam negara demokrasi, ada saatnya pemerintah harus turun tangan langsung mengintervensi warganya, dan ada saatnya untuk menyerahkan kembali pengelolaannya kepada komunitas setempat, tergantung dari konteksnya.

Partisipasi masyarakat dalam konteks pembangunan adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek (Adisasmita, 2006). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Adisasmita (2006) Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai arti yang sangat penting, yaitu :

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya proyek pembangunan serta proyek-proyek akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program atau proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tertentu.
3. Adanya suatu anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa mereka pun mempunyai hak turut urun rembuk (memberikan saran) dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Purawouw *dalam* Koampa (2015) Partisipasi berbasis masyarakat adalah suatu proses aktif dimana penduduk secara langsung ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek atau program pembangunan yang mereka miliki dengan tujuan untuk menumbuhkan kemandiriannya, meningkatkan pendapatannya, dan pengembangan. Lebih lanjut, dijelaskan pengertian dari partisipasi petani adalah keikitsertaan dari petani baik secara individu maupun secara kelompok dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam bidang usaha pertanian.

## **2. Bentuk-bentuk Partisipasi**

Dusseldorp *dalam* Mardikanto (2013) Bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok.
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain.
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat.
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan.
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Selain itu, adanya keragaman partisipasi berdasarkan input yang disumbangkan, dan keikutsertaannya dalam memanfaatkan hasil pembangunan,

seperti : memberikan input, menerima imbalan atas input yang diberikan, dan menikmati manfaat hasil. (Slamet *dalam* Mardikanto, 2013):

- a. Ikut memberi input, menerima imbalan atas input yang diberikan serta ikut pula memanfaatkan hasil pembangunan. Partisipasi semacam ini dapat dilihat pada ketersediaan masyarakat pelaksanaan proyek-proyek padat-karya untuk perbaikan jalan atau saluran pengairan oleh masyarakat setempat.
- b. Ikut memberikan input, tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, tetapi ikut memanfaatkan hasil pembangunannya. Partisipasi seperti ini dapat dijumpai pada petani yang bergotong royong memperbaiki saluran air pengairan, atau anggota masyarakat yang bekerja sama membersihkan lingkungannya
- c. Ikut memberikan input menerima imbalan atas input yang diberikan tetapi tidak ikut memanfaatkan hasilnya. Partisipasi seperti ini dapat dilihat pada para pekerja bangunan yang turut dalam pembangunan hotel-hotel berbintang, namun meskipun para pekerja tersebut turut berpartisipasi dalam pembangunan hotel, mereka tidak akan turut menikmati hasil pembangunannya, karena tidak akan mampu membayar sewa hotelnya
- d. Ikut menerima imbalan dan menerima hasil pembangunan, tetapi tidak turut memberikan input. Partisipasi seperti ini, dapat dijumpai pada “pihak ketiga” dalam pelaksanaan pembangunan, meskipun partisipasi seperti ini sebenarnya tidak dikehendaki didalam proses pembangunan.
- e. Ikut memberikan input, meskipun tidak menerima imbalan atas input yang diberikan, dan juga tidak ikut serta menikmati manfaat hasil pembangunan. Partisipasi seperti ini, bisa dilakukan oleh para penyumbangan dana (*donateur*) atau sponsor-sponsor kegiatan sosial (pendirian panti asuhan, dan lain-lain).

Berdasarkan kelima macam keragaman partisipasi seperti diatas, bentuk partisipasi (b) seharusnya lebih banyak dikembangkan, dan partisipasi (a) hanya diberlakukan bagi masyarakat “lapisan-bawah”, sedangkan partisipasi (e) seharusnya jangan diharapkan dari warga masyarakat lapisan “bawah”. Disamping

itu, partisipasi (d) seharusnya tidak boleh terjadi, meskipun dalam praktik akan sangat sulit dihindari.

Cohen dan Uphoff *dalam* Fadil (2013) dalam pengkajiannya menyatakan bahwa partisipasi dapat dilihat dalam berbagai pandangan, yakni :

1. kontribusi secara sukarela dari komunitas terhadap suatu program untuk masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan dalam implementasi program serta menikmati bersama keuntungan-keuntungan dari program pembangunan, keterlibatan masyarakat dalam mengevaluasi program, suatu proses aktif diaman rakyat dari suatu komunitas mengambil inisiatif dan menyatakan dengan tegas otonomi mereka.
2. Meningkatkan kontrol terhadap sumberdaya dan mengatur lembaga-lembaga dalam situasi sosial yang ada. Untuk meningkat partisipasi masyarakat maka keterlibatan masyarakat dalam berbagai program dalam pembangunan terutama menyangkut pengambilan keputusan pembangunan dalam tingkat komunitas sangat penting.

Lebih lanjut dijelaskan Cohen dan Uphoff *dalam* Fadil (2013) bahwa menguraikan bentuk-bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu :

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan/perencanaan
2. Partisipasi dalam pelaksanaan
3. Partisipasi dalam menerima manfaat
4. Partisipasi dalam evaluasi

Dari keempat unsur yang diuraikan diatas juga senada dengan pernyataan Yadav *dalam* Mardikanto (2009) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu : Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pemanfaatan Hasil, dan Partisipasi dalam evaluasi.

Maka berdasarkan dari kedua teori yang memiliki kesamaan tersebut maka penulis mengambil teori yang dijelaskan oleh Yadav *dalam* Mardikanto (2009). Untuk penejelasan yang lebih rinci dijelaskan pada bagian “Partisipasi Petani dalam Pengelolaan Kegiatan”.

### 3. Tingkat Partisipasi

Wilcox dalam Mardikanto (2013) Dilihat dari tingkat atau tahapan partisipasi, mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan yaitu :

- a. Memberikan informasi (*Information*)
- b. Konsultasi (*consultation*) yaitu: menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik , tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberi dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan
- d. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut serta dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitran dalam pelaksanaan kegiatannya
- e. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*) di mana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Tingkat partisipasi dalam masyarakat tidak sama tergantung sejauh mana keterlibatan mereka dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Sebagai contoh: (1) masyarakat bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program pemerintah, (2) anggota masyarakat ikut menghadiri pertemuan-pertemuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkajian ulang proyek namun sebatas pendengar semata, (3) anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan tentang cara melaksanakan sebuah proyek dan ikut menyediakan bantuan serta bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proyek, (4) anggota masyarakat terlibat secara aktif dalam semua tahapan proses pengambilan keputusan, yang meliputi perencanaan sebuah program, pelaksanaan, pengawasan, dan *monitoring*.

Tingkat partisipasi masyarakat berdasarkan keempat contoh, dimana yang paling tinggi secara berturut-turut adalah pada contoh kasus nomor 4, 3, dan 1. Bentuk-bentuk pengambilan bagian atau pengikutsertaan (keterlibatan langsung) masyarakat dalam pembangunan pertanian dapat berupa: pengambilan keputusan

bersama pada semua aktifitas, belajar bersama, melakukan *monitoring*, dan evaluasi bersama-sama.

Berdasarkan uraian diatas, maka dilihat dari perkembangannya partisipasi tidak lagi diasumsikan sebagai pemberian kontribusi berupa uang atau sarana masyarakat secara sukarela, tetapi lebih ditekankan pada pengembangan kapasitas masyarakat yang didalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat dalam informasi, pengambilan keputusan, serta kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan yang mempengaruhi masa depan masyarakat itu sendiri.

#### **4. Partisipasi Petani Dalam Pengelolaan Kegiatan**

Partisipasi yang merupakan keterlibatan atau keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (*ineterensik*) maupun dari Luar (*eksterensik*) dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan.

Yadav *dalam* Mardikanto (2009) mengemukakan tentang adanya empat macam kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu:

##### **a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan**

Pada umumnya, setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. karena itu perlu dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau ditingkat lokal.

Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dilakukan dengan membuka forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi dalam mengungkapkan ide atau gagasan serta adanya pengambilan keputusan tentang program-program yang akan dilaksanakan di wilayah tersebut. Keterlibatan seseorang dalam perencanaan sekaligus membawa dalam proses pembentukan keputusan.

### **b. Partisipasi dalam pelaksanaan**

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dilihat dari sejauh mana masyarakat ikut berperan aktif di dalam kegiatan - kegiatan yang merupakan perwujudan dari program - program yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap pelaksanaan, pengukuran bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat secara nyata terlibat dalam aktivitas - aktivitas riil yang merupakan perwujudan program yang telah digariskan di dalam kegiatan -kegiatan fisik.

### **c. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi**

Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi sangatlah diperlukan, agar tercapainya tujuan yang diharapkan dari berjalannya kegiatan atau program-program yang telah disusun. Pemantauan dan evaluasi diharapkan adanya umpan balik tentang masalah-masalah atau kesenjangan yang muncul di dalam pelaksanaan program.

Dalam Tahap ini, partisipasi masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan perkembangan kegiatan serta perilaku aparat pembangunan sangat diperlukan.

### **d. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil**

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil bertujuan untuk memperbaiki mutu masyarakat di dalam pelaksanaan program. Pemanfaatan hasil digunakan sebagai ukuran apakah program yang telah disusun tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai hasil dari adanya program-program yang telah dilaksanakan. Pemanfaatan hasil program akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

## **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani**

### **a. Kemauan**

Kemauan merupakan salah satu unsur pokok yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam suatu kegiatan (Slamet *dalam* Mardikanto, 2009). Hal senada juga disampaikan ulang oleh Mardikanto dan Poerwoko (2013) bahwa kemauan adalah salah satu unsur pokok yang mempengaruhi masyarakat untuk tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Sehingga variabel



kemauan layak untuk dijadikan variabel dalam pengkajian ini, karena merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi.

Kemauan untuk berpartisipasi, umumnya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya, yang menyangkut (Mardikanto dan Poerwoko, 2013) :

- 1) Sikap yang meningkatkan nilai-nilai yang menghambat pembangunan
- 2) Sikap terhadap penguasa dan pelaksana pembangunan pada umumnya
- 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki mutu hidup dan tidak cepat puas diri
- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah, dan tercapainya tujuan pembangunan
- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

Berlandaskan pada konsep-konsep diatas, maka tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan dapat diupayakan melalui (Mardikanto dan Poerwoko, 2013) :

- 1) Pemberian kesempatan yang dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat memiliki kemampuan dan kearifan tradisional kaitannya dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidupnya, dan bukannya pemberian kesempatan yang dilandasi oleh prasangka buruk agar mereka tidak melakukan kerusakan.
- 2) Penyuluhan yang intensif dan berkelanjutan, yang tidak saa berupa penyampaian informasi tentang adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, melainkan juga dibarengi dengan dorongan dan harapan-harapan agar masyarakat mau berpartisipasi, serta upaya yang terus menerus untuk meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi.

Berkaitan dengan dorongan dan harapan yang disampaikan, perlu adanya penjelasan kepada masyarakat tentang besarnya manfaat ekonomi maupun non-ekonomi yang dapat secara langsung dan tak langsung dinikmati sendiri maupun yang akan dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

## **b. Kemampuan**

Mardikanto dan Poerwoko (2013) menyatakan bahwasanya kemampuan juga merupakan salah satu unsur pokok yang mempengaruhi masyarakat untuk

berpartisipasi. Hal senada juga dinyatakan oleh Slamet *dalam* Ruhimat (2013) bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program yaitu faktor kemampuan masyarakat, faktor kesempatan, dan faktor motivasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam pengkajian Suprayitno, dkk (2011) menyebutkan peningkatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan petani baik itu dari segi kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan kemampuan sosial.

Theresia (2013) menjelaskan bahwa perlu didasari adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki untuk berpartisipasi. Yang dimaksud dengan kemampuan disini sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan-kesempatan untuk membangun, atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
- 2) Kemauan untuk melaksanakan pembangunan, yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki
- 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan (peluang) lain yang tersedia secara optimal.

Berdasarkan penjelasan tentang kemampuan tersebut, maka faktor yang mempengaruhi ini layak untuk dijadikan variabel dalam pengkajian ini. Artinya dengan melihat kemampuan yang dimiliki oleh responden maka akan diperoleh seberapa besar responden akan berpartisipasi pada pengelolaan LKM-A tersebut.

### **c. Kesempatan**

Kesempatan merupakan salah satu unsur pokok yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi (Mardikanto dan Poerwoko,2013). Hal senada juga disampaikan oleh Slamet *dalam* Ruhimat (2013) bahwa terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sebuah program salah satunya adalah kesempatan. Faktor kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sebuah kebijakan.

Theresia (2013) menyebutkan dalam kenyataannya banyak program pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat karena kurangnya kesempatan yang kurang memperoleh partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi,

dilain pihak juga sering dirasakan tentang kurangnya “informasi” yang disampaikan kepada masyarakat kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi. Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah:

- 1) Kemauan politik dari pengusaha untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pemeliharaan dan pemanfaatan pembangunan sejak ditingkat pusat sampai di jajaran birokrasi yang paling bawah
- 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan
- 3) Kesempatan pemanfaatan dan mobalisasi sumberdaya (alam dan manusia) untuk pelaksanaan pembangunan
- 4) Kesempatan untuk memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat, termasuk peralatan/perlengkapan penunjang
- 5) Kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perijinan, dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan
- 6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan dan mengembangkan serta memelihara partisipasi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas, kesempatan yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk terlibat atau berpartisipasi pada suatu kegiatan, maka faktor kesempatan ini layak untuk dijadikan sebagai variabel dalam pegkajian ini. Artinya dengan melihat kesempatan yang dimiliki oleh petani responden untuk terlibat dalam LKM-A maka dapat diketahui seberapa besar mau berpartisipasi dalam pengelolaan LKM-A tersebut.

#### **d. Kepemimpinan**

Kepemimpinan merupakan suatu deskripsi tentang kegiatan seseorang yang dinilai sebagai pemimpin dan memiliki ciri seperti : posisinya sebagai pusat, perannya sebagai pemberi arah, sebagai penggerak aktivis kelompok, dan memberikan bentuk dalam kegiatan. Pengertian kepemimpinan lebih dititikberatkan pada segi fungsi struktur. Oleh karena itu, kepemimpinan merupakan ciri-ciri aktivitas seseorang dapat mempengaruhi pengikutnya serta merupakan instrument agar dapat melancarkan suatu aktivitas untuk mencapai tujuan. (Walgito, 2008)

Kepemimpinan mempengaruhi terhadap partisipasi petani dalam melaksanakan kegiatan. Hal serupa disebutkan pada hasil penelitian Isyaturriyadhah, dkk (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan berkelompok. Lebih lanjut dijelaskan bahwa kepemimpinan Gapoktan yang dicirikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan gaya ketua Gapoktan dalam mengelola Gapoktan sesuai dengan situasi dan tingkat kematangan anggota Gapoktan tentu berpengaruh terhadap peran serta dan keterlibatan aktif anggota Gapoktan pada kegiatan yang dilakukan Gapoktan.

Sanyatma *dalam* Isyaturriyadhah, dkk (2017) menjelaskan dalam hasil penelitiannya bahwa dalam menggerakkan anggota untuk berkontribusi maka ketua Gapoktan menggunakan 4 gaya kepemimpinan yaitu:

1. Gaya *telling* (memberikan supervisi dan instruksi) ketika terdapat anggota Gapoktan yang tidak mengetahui dan tidak mau mengikuti kegiatan.
2. Gaya *selling* (memberikan dorongan dan motivasi) ketika terdapat anggota Gapoktan yang mengetahui, tetapi tidak mau mengikuti kegiatan.
3. Gaya *participating* (memberikan fasilitasi) ketika terdapat anggota Gapoktan yang mengetahui, tetapi berkeinginan kuat mengikuti kegiatan.
4. Gaya *delegating* (memberikan asistensi dan pengarahan) ketika terdapat anggota yang mengetahui dan mau mengikuti kegiatan.

Ashari *dalam* Suroso, dkk (2014) menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mempengaruhi dan menghimbau bawahannya, dan harus memiliki keterbukaan terhadap pandangan-pandangan baru, tanggap atas keperluan bawahannya, serta mendukung pelaksanaan inovasi. Selain itu juga bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas para anggota kelompok.

Pemimpin kelompok dengan kata lain pengurus dalam kelompok memiliki peran sebagai koordinator, dimana mereka menjelaskan dan menunjukkan hubungan antara berbagai pendapat dan saran, dan mempersatukan saran tersebut dan juga tetap mengkoordinir kegiatan anggota, serta pemimpin berperan sebagai penggerak kelompok untuk bertindak mengambil keputusan, dan memberi dorongan/semangat kepada anggota agar melakukan kegiatan yang telah

ditetapkan. Semakin sering pemimpin berhubungan dengan anggota semakin sering pula para anggota untuk bekerja sama.

Suatu kegiatan bersama akan berjalan bagus jika kepemimpinannya bagus. Sehingga kepemimpinan sangat berpengaruh untuk seseorang berpartisipasi. Oleh sebab itu, faktor kepemimpinan ini layak untuk dijadikan sebagai variabel dalam pengkajian ini. Artinya dalam pengkajian ini akan dilihat seberapa besar pengaruh yang diberikan pemimpin LKM-A kepada petani responden sehingga berpartisipasi dalam pengelolaan LKM-A.

#### **e. Sosialisasi**

Sosialisasi memiliki pengaruh secara nyata terhadap partisipasi (Deswati dan Triyanti, 2015). Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program yang bersifat nasional karena menjadi pintu pembuka bagi masyarakat dan stakeholder terkait dalam memahami program tersebut.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Jakarta *dalam* Deswati dan Triyanti (2015) menjelaskan pengertian Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, kebijakan, peraturan) dari satu pihak (pemilik program, kebijakan, peraturan) kepada pihak-pihak lain (aparatur, masyarakat yang terkena program, dan masyarakat umum).

Sosialisasi yang baik mengenai suatu program nasional adalah penyampaian informasi yang baik dan benar dengan penggunaan bahasa yang mudah dimengerti mulai dari tingkat pusat hingga calon penerima bantuan. Oleh karena itu bentuk sosialisasi menjadi salah satu faktor yang menentukan besar tidaknya partisipasi masyarakat. Lokasi yang sosialisasinya baik maka dapat memilih calon penerima yang tepat sasaran sehingga bantuan yang diberikan juga bisa bermanfaat dalam meningkatkan perkembangan usaha (Deswati dan Triyanti, 2015).

Sandyatma (2012) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota Gapoktan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi kegiatan yang diberikan ketua beserta pengurus Gapoktan dan penyuluh selaku pendamping kepada anggota Gapoktan. Maka dapat

disimpulkan bahwa sosialisasi ini sangat berpengaruh secara nyata untuk partisipasi masyarakat ataupun anggota pada setiap kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga tercapai apa yang diharapkan oleh suatu kelompok-kelompok yang dibentuk bersama.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka faktor sosialisasi ini layak untuk dijadikan variabel dalam pengkajian ini. Karena dengan adanya kegiatan sosialialisasi akan meningkatkan partisipasi masyarakat pada suatu kegiatan. Sehingga dengan dijadikannya ini sebagai variabel, maka dapat dilihat seberapa besar pengaruh sosialisasi ini kepada petani responden untuk berpartisipasi dalam pengelolaan LKM-A.

#### **f. Kepercayaan**

Kepercayaan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, dengan adanya kepercayaan bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan (Mardikanto,2009).

Sejalan dengan hal tersebut, Gambetta *dalam* Faedlulloh (2015) menyatakan, berbagai tidakan kolektif yang didasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi (*high trust*) akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi, terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama dan terutama kemajuan dalam bidang ekonomi.

Hasbullah *dalam* Faedlulloh (2015) mengartikan kepercayaan merupakan energi kolektif masyarakat atau bangsa untuk mengatasi problem bersama dan merupakan sumber motivasi guna mencapai kemajuan ekonomi bagi masyarakat atau bangsa. Rasa saling percaya ini tumbuh dan berakar dari nilai-nilai yang melekat pada budaya kelompok.

Coleman *dalam* Faedlulloh (2015) menyatakan pada tingkatan relasi sosial sumber kepercayaan (*trust*) berasal dari norma sosial yang memang telah melekat pada stuktur sosial komunitas (masyarakat/bangsa) yang diikat dengan nilai-nilai budaya. Hal ini terutama berkaitan dengan kepatuhan anggota komunitas terhadap berbagai kewajiban bersama yang telah menjadi kesepakatan tidak tertulis pada komunitas tersebut. lebih lanjut dijelaskan Ghosal *dalam* Faedlulloh (2015) bahwa pada tingkatan individual *trust* bersumber dari nilai-nilai, diantaranya dari: (a) agama

atau kepercayaan yang dianut, (b) kompetensi seseorang, dan (c) keterbukaan, yang telah menjadi norma di masyarakat dan diyakini oleh seseorang.

Faedlulloh (2015) menyimpulkan dalam hasil penelitiannya bahwa kepercayaan (*trust*) bisa dibangun melalui implementasi nilai-nilai koperasi. Dengan menjalankan nilai-nilai keswadayaan, swatanggung jawab, demokrasi, kebersamaan, kesetaraan, keadilan dan kesetiakawanan/solidaritas secara konsisten, bibit-bibit *trust* hadir tak terelakan.

Memiliki kepercayaan memang menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam kegiatan bersama. Oleh sebab itu, faktor kepercayaan ini layak untuk dijadikan variabel. Sehingga kegiatan LKM-A yang merupakan kegiatan bersama dapat dilihat seberapa besar pengaruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelola LKM-A tersebut dengan tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing petani responden.

## **6. Program Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)**

Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 90/Per/SM.820/J/12/12 menjelaskan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis atau disingkat dengan LKM-A adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh petani di perdesaan yang melaksanakan fungsi pelayanan kredit/pembiayaan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisni. (Kementan, 2012)

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terbentuknya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) diawali tahun 2008 saat kementerian Pertanian melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebagai program prioritas yang dilaksanakan secara terintegrasi dibawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM mandiri). PUAP ialah bantuan pemerintah untuk masyarakat perdesaan dengan menyalurkan bantuan modal usahatani yang bersifat stimulant. Penyaluran dana bantuan setiap tahun sebesar Rp. 100 Juta per Gapoktan pada 10 desa yang terbesar di 33 Provinsi. Bantuan modal ini disebut sebagai dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP. (Kementan, 2017)

Kementerian Pertanian (2010) menjelaskan bahwa salah satu tujuan PUAP ialah meningkatkan fungsi Kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring

atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa tahun 2010 merupakan tahun transformasi bagi Gapoktan penerima PUAP 2008 agar membentuk kelembagaan keuangan mikro. Gapoktan penerima PUAP harus dapat mengelola dana melalui perguliran dan penambahan dana keswadayaan, sehingga dapat berfungsi sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada tahun ketiga pengembangannya.

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan unit usaha otonom Gapoktan yang berhasil ditumbuhkan oleh Gapoktan sehingga kepengurusan dan pengelolaan terpisah dari Gapoktan induknya. Data dari Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, (2013) menyebutkan bahwa sampai tahun 2011 telah berhasil dibangun sebanyak 44.173 unit PUAP.

Hanggana (2017) dalam pengkajiannya disebutkan bahwa pada hakekatnya, pengembangan lebih lanjut dari Gapoktan PUAP menjadi LKM-A dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan kepastian pelayanan serta kemudahan akses petani pada fasilitas pembiayaan.
- b. Menyediakan prosedur yang sederhana dan cepat.
- c. Kedekatan lokasi pelayanan dengan tempat usahatani.
- d. Pengelolaan LKM-A sangat memahami karakter petani sebagai nasabah.

Dalam pelaksanaan LKM-A ini bahwa untuk memperbesar modal LKM-A, selain dari Bantuan Langsung Menerima (BLM) PUAP juga dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, dan koperasi lainnya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka (Hanggana, 2017).

Santoso (2014) dalam penumbuhan LKM-A terdapat 7 prinsip yang harus dijadikan acuan dalam penumbuhannya, seperti berikut:

- a. Prinsip kebutuhan, artinya LKM-A hanya ditumbuh kembangkan di lokasi potensial yang petaninya memerlukan dukungan fasilitasi permodalan, belum ada lembaga jasa pelayanan keuangan di lokasi itu. Dengan demikian LKM-A akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat.
- b. Prinsip fleksibilitas. LKM-A yang ditumbuhkembangkan harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya setempat.



- c. Prinsip partisipatif. Penumbuhan LKM-A harus melibatkan para petani di lingkungan setempat, sehingga selain dapat mengakomodasi aspirasi petani, pengembangan yang dibangun secara partisipatif akan mampu membangun rasa kepedulian dan kepemilikan serta proses melalui bekerja bersama.
- d. Prinsip akomodatif. Dalam hal ini penumbuhan LKM-A harus mengedepankan pemenuhan kebutuhan nasabah. Persyaratan untuk akses ke LKM-A disusun sedemikian rupa sehingga bisa membuka peluang seluas-luasnya untuk menjangkau kebutuhan petani dengan kelengkapan persyaratan minimal yang dimiliki petani.
- e. Prinsip kemandirian. Artinya, meskipun penumbuhan dan pembentukan LKMA bertujuan menyediakan permodalan usahatani, namun jangan sampai menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong terjadinya penguatan kapasitas kelembagaan kelompok tani.
- f. Prinsip kemitraan. Dalam hal ini penumbuhan dan pembentukan LKM-A dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti penyedia sarana produksi, tokoh-tokoh masyarakat tani, dunia usaha, perguruan tinggi, dan instansi sektoral terkait dalam setiap kegiatan.
- g. Prinsip keberlanjutan. Penekanan keberlanjutan adalah pada kemampuan organisasi LKM-A untuk tetap terus berjalan, meskipun sudah tidak ada campur tangan lembaga atau aparat pemerintah dan swasta yang mendukungnya.

Pasaribu (2015) mekanisme pemberian pinjaman mengikuti langkah-langkah: (1) Penyusunan rencana usaha (RU) oleh anggota yang hendak meminjam; (2) Pengajuan pinjaman dengan RU disampaikan kepada ketua kelompok; (3) Ketua kelompok mempelajari RU dan memberikan memo untuk mengajukan pinjaman ke pengurus LKM-A; dan (4) Berdasarkan RU dan memo ketua kelompok yang dianggap lebih mengenal usahatani dan karakter peminjam, pengurus LKM-A mengeluarkan pinjaman sejumlah yang dibutuhkan. Pinjaman dikenakan bunga 10 sebesar 2 persen perbulan dengan lama pinjaman rata-rata satu musim tanam

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Pengkajian terdahulu merupakan suatu penelitian yang memiliki kaitan yang relevan dengan pengkajian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ialah untuk memperjelas deskripsi variable-variabel yang dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk membedakan dan membandingkan antara penelitian yang akan dikaji dengan sebelumnya serta mengkaji ulang hasil pengkajian serupa yang pernah dilakukan. Adapun hasil penelitian terdahulu dimuat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Ringkasan Beberapa Penelitian Terdahulu Mengenai Partisipasi Petani Terhadap Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).**

No	Judul/Tahun	Faktor-faktor yang di Analisis	Metode Analisis	Hasil Pengkajian
1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Gabungan Kelompok Tani Tanjung Sehati Dalam Kegiatan Kelompok Di Kabupaten Merangin (Isyaturriyadhah, dkk, Asnawati Is dan Effy Yudiawati, 2017)	- <i>Umur</i> - <i>Motivasi</i> - <i>Kepemimpinan Gapotan</i> - <i>Peran Pemerintah Desa</i> - <i>Peran Penyuluh</i> - <i>Peran Pedagang</i>	mixed methods yaitu metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda	-Tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan berkelompok tinggi. -Faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan berkelompok adalah motivasi, kepemimpinan Gapoktan, peran pemerintah desa dan peran penyuluh sedangkan faktor-faktor yang tidak signifikan adalah usia dan peran pedagang.
2.	Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Menunjang Efektivitas Gapoktan Pada	- usia, - pendapatan - motivasi - intensitas menerima sosialisasi	Metode kombinasi kualitatif dan kuantitatif	- tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada Kegiatan Penguatan-LDPM adalah rendah. - Faktor-faktor yang signifikan

Lanjutan Tabel 1.

No	Judul/Tahun	Faktor-faktor yang di Analisis	Metode Analisis	Hasil Pengkajian
	Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Di Kabupaten Bogor (Yudhi Harsatriadi Sandyatma, 2012)		( <i>mixed methods</i> ) dengan analisis regresi linear berganda	berpengaruh terhadap partisipasi anggota Gapoktan pada Kegiatan Penguatan-LDPM adalahusia, pendapatan, motivasi, dan intensitas menerima sosialisasi kegiatan
3.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (Pump) Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rismutia Hayu Deswati dan Triyanti, Dan Riesti Triyanti, 2015)	- Sosialisasi Program - Pelatihan - Workshop - Keberadaan KUKP	Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif frekuensi serta analisis chi square	- faktor yang mempengaruhi adalah sosialisasi, pelatihan yang diikuti, workshop dan Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP).
4.	Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan : Studi Kasus Di Kph	- Kemampuan - Kesempatan - motivasi	<i>Analisis</i> statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan <i>Structural Equation Modelling</i> (SEM)	variabel motivasi berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat dan variabel kemampuan dan kesempatan masyarakat berpengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi masyarakat.

Lanjutan Tabel 1.

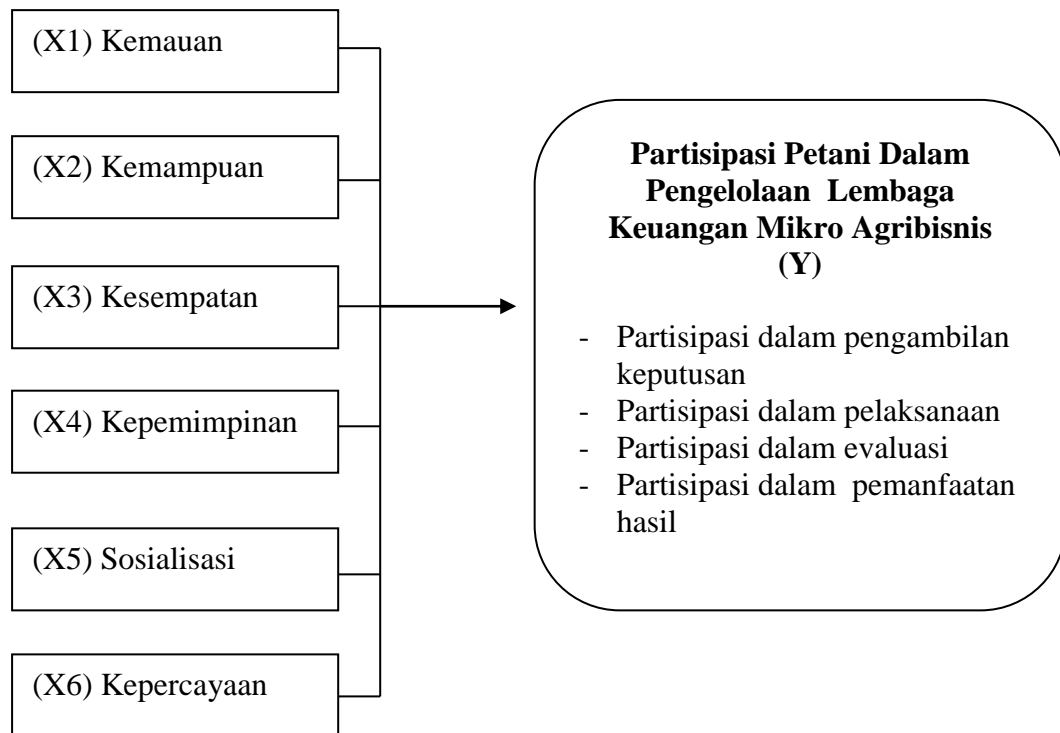
No	Judul/Tahun	Faktor-faktor yang di Analisis	Metode Analisis	Hasil Pengkajian
	Model Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (Idin Saepudin Ruhimat, 2013)	-	Analisis statistik deskriptif dan statistik inferensial dengan <i>Structural Equation Modellig</i> (SEM)	- model peningkatan partisipasi masyarakat adalah meningkatkan motivasi masyarakat melalui usaha

### C. Kerangka Pikir

Keberhasilan dalam pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dapat dilihat dari tingkat partisipasinya. Partisipasi adalah keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Dalam partisipasi ada tahap yang menunjukkan partisipasi masyarakat, menurut Yadav dalam Mardikanto (2013) yaitu terdiri dari partisipasi dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemantauan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil. Tumbuhnya partisipasi tersebut karena adanya faktor-faktor yang tentunya untuk memudahkan dalam pengelolaan LKM-A dalam mencapai tujuannya sehingga tersedianya akses permodalan bagi petani di lokasi tersebut. Namun faktor-faktor tersebut yang dimaksud belum bisa dipastikan secara nyata berpengaruh atau tidak pada partisipasi petani dalam pelaksanaan LKM-A, sehingga dilakukan penelitian untuk mengkaji tingkat partisipasi pada faktor –faktor yang mempengaruhi partisipasi petani dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

Dengan demikian, maka untuk mempermudah dalam pengarahannya penelitian ini, maka disusun kerangka pikir dengan mempersepsikan suatu objek yang dapat mempengaruhi individu. Adapun faktor mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) meliputi Kemauan, kemampuan, kesempatan, kepemimpinan, sosialisasi, dan Kepercayaan.

Berdasarkan uraian diatas, secara sistematis penyusunan kerangka pemikiran pengkajian ini dipaparkan pada Gambar 1 berikut:



**Gambar 1: Kerangka Pikir Partisipasi Petani dalam Pengelolaan LKM-A di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang**

#### **D. Hipotesis**

Berdasarkan permasalahan maka penulis dapat membangun hipotesis sebagai bentuk kesimpulan sementara untuk menjawab dari rumusan permasalahan yang ada. Adapun Hipotesis Pengkajian ini adalah :

1. Diduga tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) rendah.
2. Diduga kemauan, kemampuan, kesempatan, kepemimpinan, sosialisasi, dan kepercayaan mempengaruhi tingkat partisipasi petani dalam pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).